

Lampiran 1

Wawancara Kamis, 20 Mei 2010, 9.45-10.15

Pejabat DJP: Jul Seventa Tarigan (Kasi Perjanjian Eropa) mewakili Direktur
Perpajakan

1. Apakah yang dimaksud dengan *Controlled Foreign Corporation (CFC)*?

Jawaban:

CFC adalah upaya wajib pajak dengan menggunakan struktur/*arrangement* tertentu yaitu dengan mendirikan perusahaan di luar negeri untuk menunda/menghindari pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri/menunda pembayaran pajak di Indonesia. Motifnya penundaan pajak, yang merupakan jenis *tax planning*. Alasan penundaan karena dianggap lebih jelek bayar pajak sekarang daripada bayar pajak nanti. Bisa jadi, ditangguhkan lama kelamaan bisa jadi lupa dan tidak dibayar.

2. Apakah bedanya CFC dengan *base company income*?

Jawaban:

Base company dilakukan dalam area menghindari pajak dengan menentukan harga tidak wajar. Praktek *base company* resikonya tinggi dan bisa di *counter* dengan *cfc rules* atau *Transfer Pricing rules*. Apabila *cfc rules* tidak bisa menjangkau karena tidak memenuhi kriterianya misalnya, bisa jadi perusahaan di luar negeri terdaftar di bursa efek, maka dicounter dengan TP rules.

3. Pasal 18 ayat (2) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, apakah peraturan ini mewakili peraturan mengenai CFC? Karena tidak dinyatakan secara eksplisit mengenai perusahaan luar negeri terkendali di dalamnya?

Jawaban:

Byk org tidak mengetahui Pasal 18 ayat (2) mengatur mengenai CFC karena tidak yakin Tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam Undang-Undang. Tapi memang itu aturan CFC Indonesia. Undang-Undang bersifat umum dan hanya memberi kewenangan/ amanat kepada Menteri Keuangan untuk menentukan saat pengakuan. KMK atau PMK lah yang harus menunjukkan bahwa ini *cfc rules*. Hal ini tidak menyalahi dari sisi kajian hukum. Public mungkin banyak yang tidak mendalami atau memahami, tetapi yg memahami percaya ada *cfc rules* di Indonesia.

4. Mengapa perlu diatur kebijakan CFC di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia?

Jawaban:

Undang-Undang diperlukan untuk menjadi suatu dasar hukum, karena kalau ada yang meng-enforce power tanpa Undang-Undang berarti menyalahgunakan kekuasaan/otoritas. Semuanya ada pemberian kewenangan. Dalam Psl 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur agar jelas apa yang boleh dilakukan oleh siapa. Menteri keuangan dalam hal ini diberi kewenangan untuk menarik pajak dari dividen yang belum dibagikan. Menurut DJP, yang boleh dipajaki adalah dividen yang sudah dibagikan. Dalam fakta belum ada dividen, dengan power dari Undang-Undang, Menteri Keuangan berhak menarik pajak. Harus jelas siapa yang dikenai aturan ini, bagaimana upaya meng-enakannya. Untuk lebih memperjelas, maka dapat dibuat turunan lagi bagi aturan pelaksanaan ini.

5. Bagaimana tahapan kebijakan yang dilakukan oleh DJP berkaitan dengan ketentuan *CFC rules* di Indonesia? Apakah melibatkan pihak lain seperti praktisi atau akademisi terkait?

Jawaban:

Pada waktu pembuatan Undang-Undang tentunya sudah ada kolaborasi dari banyak pihak, sehingga apa yang ada di UU sudah mempresentasikan kepentingan nasional maka seharusnya sudah *acceptable*. Jika suatu aturan tidak bisa diterima bukan karena dasar hukumnya tetapi mungkin dari sisi administrasi.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) hanya mengatur mengenai dividen, bagaimanakah menurut pendapat anda mengenai hal itu? Apakah konsep *deferral* dalam dividen akan selalu berarti ada penghindaran pajak sehingga harus dibuat suatu CFC sebagai *specific anti tax avoidance rules*?

Jawaban:

Pengaturan ini merupakan ketentuan Undang-Undang yang dirumuskan Pemerintah dan DPR, DJP menjalankannya. Mengenai konsep tersebut, dibandingkan dengan teori tentunya akan ada deviasi,

7. Apakah objek dari CFC dapat diperluas ke objek lain?

Jawaban:

Tentunya objek CFC bisa untuk diperluas, tidak terbatas pada dividen dari luar negeri saja.

8. Syarat yang ditetapkan di dalam Psl 18 ayat (2) yaitu:

- a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau

- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham

Menurut anda apakah syarat tersebut berarti bahwa penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri mensyaratkan kepemilikan langsung dan tidak mencakup kepemilikan tidak langsung?

Jawaban:

Syarat yang ada di dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut merupakan syarat kepemilikan langsung.

9. Peraturan pelaksana dari Pasal 18 ayat (2) UU PPh adalah KMK 650 Tahun 1994 yang berlaku dari tahun 1994-2008, yang diganti dengan PMK No 256 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009, bagaimanakah pendapat anda atas perubahan peraturan tersebut? Apakah deemed dividend sesuai dengan konsep keadilan?

Jawaban:

Pada dasarnya tujuan dibuatnya suatu *anti tax avoidance* di dalam Undang-Undang adalah untuk mengedepankan keadilan.

10. Apabila dividen tersebut benar-benar didistribusikan, bagaimana perlakuan atas penghasilan tersebut bagi wajib pajak di luar negeri maupun di dalam negeri?

Jawaban:

Tidak ada masalah, karena dapat dikreditkan atas pajak yang dipotong di luar negeri tersebut.

11. Dalam peraturan pelaksana Psl 18 ayat (2) UU PPh yaitu PMK 650 tahun 1994, Indonesia menerapkan designated approach dengan adanya 32 negara tujuan investasi yang dinyatakan sebagai tax haven. Akan tetapi di dalam PMK 256 Tahun 2008, daftar negara tax haven ini dihapuskan dan CFC diberlakukan kepada semua negara? Apakah menurut anda ini sesuai dengan konsep CFC? Dan apa yang mendasari perubahan peraturan ini?

Jawaban:

Pada dasarnya Undang-Undang sendiri tidak membatasi, yang membatasi 32 negara tersebut adalah KMK. Sehingga apabila daftar ini dihapuskan tidak menyalahi ketentuan di Undang-Undang.

12. Menurut anda, apakah DJP perlu untuk meminta keterangan kepada negara lain berkaitan dengan pelaksanaan CFC rules?

Jawaban:

Terkait dengan informasi dari negara lain, terbagi menjadi 2. Apabila Indonesia memiliki

tax treaty dengan negara lain maka jalur mendapatkan informasi dapat diperoleh melalui *exchange of information*. Apabila Indonesia tidak memiliki *tax treaty* maka melalui jalur politik, yaitu hubungan diplomatis.

13. Apakah *CFC* Indonesia telah kompatibel dengan PPh pasal 24 UU No 36 Tahun 2008 tentang Kredit Pajak Luar Negeri?

Jawaban:

CFC telah kompatibel dengan kredit pajak luar negeri yang diatur di dalam Psl 24 UU PPh, karena pada saat terjadi pembagian dividen yang sebenarnya maka dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Psl 24.

14. Apakah sepengetahuan anda, *CFC* Indonesia diaplikasikan dengan baik oleh WP sesuai dengan *self assessment system* yang ada di Indonesia?

Jawaban:

Tidak ada data valid mengenai *CFC* sejauh ini.

15. Apakah sepengetahuan anda, petugas pajak telah memahami *CFC* dan juga mengaplikasikannya dengan baik? Apakah ada data valid yang menunjukkan bahwa *CFC rules* di Indonesia diaplikasikan dalam perpajakan di Indonesia dan berapa banyak?

Jawaban:

Tidak ada data valid mengenai pelaksanaan *CFC*. Tetapi sudah ada prosedur yang baku dengan laporan keuangan konsolidasi. Selain itu telah dilakukan sosialisasi kepada para fiskus khususnya pemeriksa dan AR. Pemeriksa sudah seharusnya menguji peraturan ini sesuai dengan *self assessment system*.

Lampiran 2

Wawancara Kamis, 27 Mei 2010, 11.00-11.20

Praktisi: Rachmanto Surachmat

1. Apakah yang dimaksud dengan *Controlled Foreign Corporation (CFC)*?

Jawaban:

CFC rules adalah suatu bentuk anti avoidance yang tujuannya adalah mencegah terjadinya pengelakan pajak atas penundaan penghasilan dari negara-negara tertentu yang memiliki perlakuan khusus (secara ekstrim negara-negara ini merupakan *tax haven country* tapi tidak selalu merupakan *tax haven*. Secara teori penghasilan yang dicakup dalam CFC rules adalah *passive income* dan *active income*.

2. Pasal 18 ayat (2) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, apakah peraturan ini mewakili peraturan mengenai CFC? Karena tidak dinyatakan secara eksplisit mengenai perusahaan luar negeri terkendali di dalamnya?

Jawaban:

Iya, peraturan ini merupakan peraturan CFC di Indonesia.

3. Apakah menurut anda konsep “deferral” dalam dividen selalu berarti penghindaran pajak?

Jawaban:

Iya. Karena tidak akan dikenakan pajak sepanjang tidak ada pembagian dan tidak ada *CFC rules* yang menetapkan *deemed dividend*, khususnya apabila di luar negeri dividen ini tidak dikenakan pajak.

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) hanya mengatur mengenai dividen, bagaimanakah menurut pendapat anda mengenai hal itu? Apakah objek dari CFC dapat diperluas ke objek lain?

Jawaban:

Secara teori, objek CFC rules terdiri dari *passive income* dan *active income*. Tidak sebatas pada *passive income* saja.

5. Syarat yang ditetapkan di dalam Psl 18 ayat (2) yaitu:

- a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau

b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham Menurut anda apakah syarat tersebut berarti bahwa penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri mensyaratkan kepemilikan langsung dan tidak mencakup kepemilikan tidak langsung?

Jawaban:

Syarat kepemilikan yang ada di dalam aturan CFC Indonesia merupakan syarat kepemilikan secara langsung. Seharusnya diatur juga mengenai kepemilikan tidak langsung, karena jika tidak bisa dihindari dengan mudah melalui kepemilikan tidak langsung. Sehingga aturan ini jika dilihat menjadi kurang efektif.

6. Dalam peraturan pelaksana Psl 18 ayat (2) UU PPh yaitu KMK 650 tahun 1994, Indonesia menerapkan *designated approach* dengan adanya 32 negara tujuan investasi yang dinyatakan sebagai *tax haven*. Akan tetapi di dalam PMK 256 Tahun 2008, daftar negara *tax haven* ini dihapuskan dan CFC diberlakukan kepada semua negara? Apakah menurut anda ini sesuai dengan konsep CFC?

Jawaban:

Tidak, peraturan baru yang menghilangkan daftar 32 negara tersebut menjadi tidak mewakili CFC. Sebelumnya negara-negara yang disebutkan dalam lampiran KMK 650/KMK.04/1994, merupakan negara yang tidak mengenakan pajak atas dividen yang dibayar kepada WPLN sehingga menjadi *tax shelter*. Sehingga seharusnya disebutkan negara yang mana saja yang dikenakan *CFC rules* karena kalau tidak maka bagaimana menginterpretasinya. Konsepnya sendiri akan jadi kabur.

Terkait dengan *tax treaty*, menurut saya akan rancu dalam pelaksanaannya karena *tax treaty* berada di atas aturan domestik.

7. Menurut anda, pendekatan bagaimanakah yang lebih tepat untuk *CFC rules* Indonesia?

Jawaban:

Sudah tepat dengan peraturan yang lama, yaitu *designated jurisdictional approach*. Disebutkan daftar negara-negara di luar negeri agar menjadi jelas, transparan dan tidak ada sengketa antara fiskus dan WP. Akan tetapi daftar negara ini harus diupdate agar sesuai dengan perkembangan yang ada. Selain itu di dalamnya harus mencakup mengenai kepemilikan langsung dan tidak langsung, agar beberapa layer bisa “ditangkap” juga.

8. Apabila dilihat dari asas netralitas terhadap investasi, apakah menurut anda peraturan ini dapat membawa dampak terhadap pemilihan investasi WPDN Indonesia ke luar negeri?

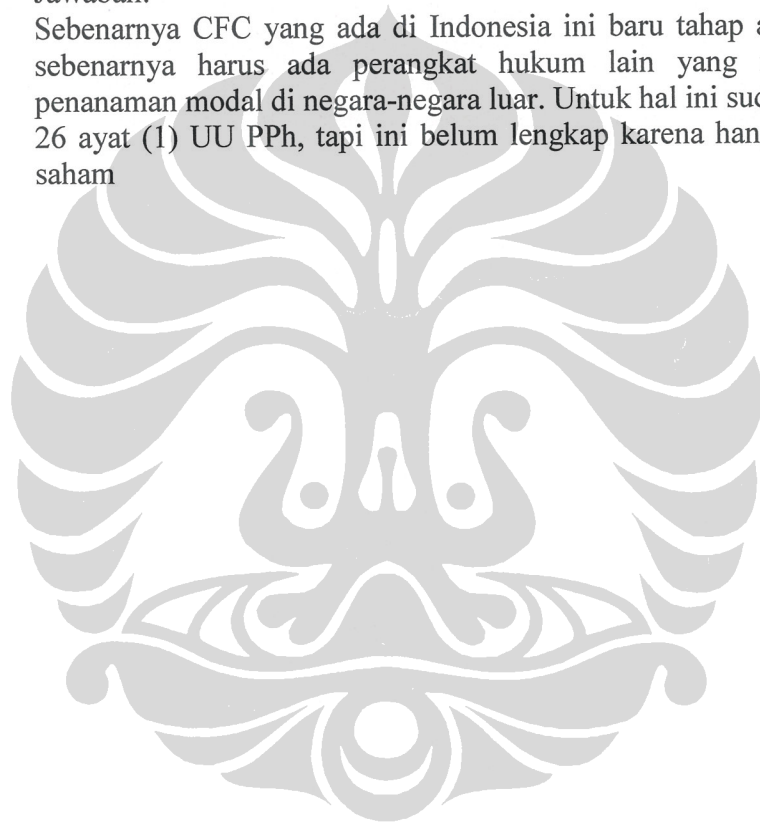
Jawaban:

Yang terpenting adalah transparansi nya dulu harus tegas. Jika dikaitkan dengan *export capital* maka ini sebelumnya harus didukung dulu dengan adanya iklim investasi yang menguntungkan di Indonesia.

9. Apakah sepengetahuan anda, *CFC* Indonesia diaplikasikan dengan baik oleh WP sesuai dengan self assessment system yang ada di Indonesia? Apakah sepengetahuan anda, petugas pajak telah memahami *CFC* dan juga mengaplikasikannya dengan baik?

Jawaban:

Sebenarnya *CFC* yang ada di Indonesia ini baru tahap awal. Yang terpenting sebenarnya harus ada perangkat hukum lain yang mengawasi informasi penanaman modal di negara-negara luar. Untuk hal ini sudah diatur di dalam Psl 26 ayat (1) UU PPh, tapi ini belum lengkap karena hanya tentang pengalihan saham



Lampiran 3

Wawancara Kamis, 17 Mei 2010, 17.00-17.45

Akademisi/Kakanwil Khusus: Riza Nurkarim

1. Apakah yang dimaksud dengan *Controlled Foreign Corporation (CFC)*?

Jawaban: Penjelasan atas CFC Indonesia

CFC Indonesia peraturannya belum seanggih negara maju yang detil, dengan pertimbangan bahwa WPDN Indonesia belum banyak yang berusaha di luar negeri dalam bentuk perusahaan, sehingga secara fakta hukum belum banyak yang harus dikontrol di luar negeri.

Untuk itu keluar peraturan yang menyebutkan kalau WPDN Indonesia baik secara sendiri atau bersama-sama memiliki suatu perusahaan di negara tertentu berlaku suatu ketentuan-ketentuan yang menentukan hasil dari dia punya usaha disana. Secara bersama-sama ini tidak harus saling kenal. Contoh A & B memiliki usaha di Hongkong dengan kepemilikan saham diatas 50% usaha di luar negeri. Jika X corp di Hongkong memperoleh laba dianggap jika memenuhi jangka waktu tertentu, maka dianggap telah diterima oleh pemilik. Porsinya setelah berjalan waktu dianggap milik di Indonesia, missal dianggap ada dividen yang telah diterima. Sehingga ini baru sebatas hasilnya saja.

Peraturan yang lama menyebutkan daftar negara-negara *tax haven*. Akan tetapi, sekarang penentuan *tax haven* telah ditetapkan oleh beberapa organisasi seperti OECD, G20, sehingga ada negara-negara yang sebelumnya termasuk negara *tax haven* menjadi tidak lagi, atau sebaliknya. Sementara di Indonesia, dari sejak 1994 sampai 2008 tidak ada perubahan daftar negara tersebut, padahal bisa saja tambah atau berkurang. Mempertimbangkan daripada diprotes WP dengan membuat daftar negara *tax haven*, maka sehubungan dengan perubahan UU PPh, materi peraturan cfcnya diperbaiki. Tidak dikaitkan lagi dengan *tax haven*, tapi seluruh dunia dimanapun letaknya, sepanjang perusahaan di sana tidak bersifat go public. Ini menjadi latar belakang perubahan atas peraturan CFC

Mengenai jangka waktu penetapan *deemed dividend*, apabila di luar negeri ada SPT (*income tax return*), maka 3 bulan setelah tanggal penyampaian, dividennya kita anggap sudah dibagikan ke wajib pajak dalam negeri Indonesia. Jika di luar negeri, perusahaan tidak memiliki kewajiban menyampaikan SPT maka 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Ini sama dengan ketentuan di Indonesia. Sehingga kontrolnya baru sebatas mencari wpdn Indonesia yang punya perusahaan di luar. Belum sampai apakah perusahaan disana hanya merupakan perpanjangan tangan. Yang dikontrol baru kepemilikan saja.

Karena DJP belum punya aparat yang bisa mengontrol itu, pajak belum sampai kesana sehingga aturan ini belum menggembirakan hasilnya. Bisa jadi WP telah melaporkan tapi ini bukan karena DJP mencari, tapi WP dengan kesadaran. Dari sisi pengawasan belum mengegembirakan. Sejauh ini belum ditemukan ada materi SKP atas koreksi CFC. Indonesia agak ketinggalan, karena secara fakta hukum wpdn Indonesia dianggap belum banyak memiliki perusahaan di luar negeri, akan tetapi fakta kenyataannya kita tidak memiliki data yang pasti. Berbeda dengan USA, yang perusahaannya berada dimana-mana, tingkat pengawasannya bahkan sampai ke bagaimana perilaku perusahaan di luar negeri tersebut.

2. Apakah CFC telah kompatibel dengan PPh Pasal 24 mengenai Kredit Pajak Luar Negeri?

Jawaban:

Berpegang pada PPh Pasal 24 UU PPh. Bila dihitung dengan cara kita, dengan tarif kita lalu dibandingkan jika dengan cara kita pakai tariff luar negeri. Apabila pajak di luar negeri lebih tinggi, maka tidak usah bayar pajak disini. Jika dihitung lebih rendah, maka ada yang harus dibayar. Konsep PPh 24 melihat lebih besar mana pajak dengan tarif di luar, dengan pajak yang diperoleh dengan penghitungan Psl 24. Berbeda dengan beberapa negara di luar apabila tarifnya lebih tinggi di luar negeri ada penghitungan khusus lagi, sedangkan Indonesia jika telah lebih tinggi maka hangus saja tidak harus bayar di Indonesia. Berlaku tariff *treaty*.

CFC deemed karena memiliki secara sendiri bersama-sama di atas 50%. Kalo jumlahnya di bawah ini, maka tidak peduli kapan laba terjadi, tetapi kapan dividen benar-benar dibagikan, karena tidak masuk kriteria CFC maka tidak berdampak (tidak ada *deemed dividend*). Sedangkan CFC dikaitkan dengan kapan terjadinya laba. Contoh pada 2009, ada *deemed dividend* 10M, kena pajak di SPT tahun 2010. Tahun 2012 diterima *real dividend* 15M, harus dicocokkan ini dengan dividen yang mana. Diketahui ini dari dividen yang telah *dideemed*, maka selisih 5M tersebut harus ditarik dengan tarif saat *dideemed* karena mungkin saja berbeda dengan tariff sekarang, sedangkan tarif luar negeri nya mengikuti tarif saat benar-benar dipotong pajak. Belum tentu saat terima *real dividend* lebih besar maka akan terjadi kurang bayar, karena tergantung tarif yang berlaku di sana.

Saat di *deemed dividend*, ada kredit pajak yang *dideemed* juga, sehingga pada saat realisasinya ada penghitungan ulang untuk mengetahui berapa yang seharusnya dibayar. Jika tidak ada *deemed* kredit, maka ada yang harus dibayar kecuali apabila di negara sana tarifnya lebih rendah atau tidak dikenakan sama sekali. Tentunya ini merugikan bagi wajib pajak dalam negeri. Contoh saat di *deemed* tarif disana 10%, saat dibayarkan tarifnya 8%, tarif kita 9%. Saat *dideemed* karena tarif sana lebih besar tidak ada pajak, sedangkan saat *real dividend*, ada selisih tarif kita lebih besar maka ada kurang bayar. Kita memakai tarif saat *deemed*, sedangkan disana dengan tarif real. Seharusnya saat realisasi dapat di *trace* itu berasal dari *deemed dividend* karena ada SPT, di luar negeri, laba setelah pajak yang benar diperoleh setelah diperiksa sehingga ada jangka waktu

No.	Stock	Name	Activity	Subsidiaries	Country	Activity	Ownership				Status di LN						
							2007	2008	2009	2009	Listed	Unlisted					
1.	BAEK	PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk	Banking	HSBC Asia Pacific Holdings Ltd HSBC Limited HSBC Holdings PLC	Inggris							99%	-	-	V		
2.	BBCA	PT. Bank Central Asia	Banking	BCA Finance Limited	Hongkong	money lending						100%	100%	-	-	V	
3.	JPPA	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Animal Feed Manufacturing	Japfa Comfeed Int Pte Ltd (JCFP) Japfa Comfeed India Ltd (JCL) Regional Trader Pte Ltd Japfa Comfeed Holding BV (JCH) Japfa Comfeed BV (JCBV)	Singapore India Singapore Netherlands Netherlands	trading, investing & poultry Poultry trading financial						100%	100%	100%	100%	V	
4.	UNTR	PT. United Tractors Tbk	Trader (Heavy Equipment)	UT Heavy Industry (S) Pte Ltd (UTHI) RichCoal Resources Limited Seacore Worldwide Limited	Seychelles British Virgin Islands	Trading and assembling of heavy equipment Coal trading Coal trading						100%	100%	100%	100%	V	
5.	MNCA	PT. Media Nusantara Citra Tbk	Advertising, Printing and Media	Media Nusantara Citra BV (MNC BV) MNC International Middle East Ltd (MIMEL) MNC International Limited (MIL) Linktone Ltd MNC Pictures FZ LLC (MP)	Netherlands Dubai Cayman Island Cayman Island Dubai	Broadcasting Broadcasting Broadcasting Broadcasting Broadcasting						100%	100%	100%	100%	V	
6.	ADRO	PT. Adaro Energy Tbk	Coal Mining	Adaro Finance BV (Adaro Finance) Rach Ltd Rachpore Investments Pte Ltd (Rachpore) Arindo Holdings Ltd (Arindo Holdings) Vindoor Investment Ltd (Vindoor) Coaltrade Services International Pte Ltd (Coaltrade) Arindo Global BV (Arindo Global) Ariane Investment Pty Ltd Indonesia Coal Pty Ltd Rachmalta Investment Ltd MIEC Indo Coal BV Coronado Holdings Pte Ltd Orchard Maritime Logistics Pte Ltd Orchard Maritime Netherlands BV Joyce Corner International	Netherlands Mauritius Singapore Mauritius Mauritius Singapore Netherlands Australia Australia Malta Netherlands Singapore Singapore Netherlands Seychelles	Service Investing Investing Investing Investing Coal trading Service Investing Investing Investing Investing Investing Coal transportation Investing Investing						33%	100%	100%	100%	V	
7.	ISAT	PT. Indosat Tbk	Telecommunication	Indosat Finance Company BV Indosat International Finance Company BV Indosat Singapore Pte Ltd Satelindo International Finance B.V.	Netherlands Netherlands Singapore Netherlands	financial financial Telecommunication Finance						100%	100%	100%	100%	V	
8.	ALKA	PT. Alkasa Industri Tbk	Holding and Investment Company	Alakasa Company Limited	Hongkong	Raw Material Trading						99,99%	99,99%	100%	-	V	
9.	PT. Sullim Ivomas Pratama	PT. Sullim Ivomas Pratama		Silverton Investments Ltd (SIL) Lussum Singapore Pte Ltd Sumatra Bioscience	Mauritius Singapore Singapore	Investment Trading & Marketing Trading, marketing, research						-	-	100%	56%	V	
10.	ARGO	PT. Argo Pantes	Textile	Argo Pantes Ltd (APHK)	Hongkong	Sales representative						95%	95%	99%	-	V	
11.	SAFE	PT. Steady Safe Tbk	Transportation	Steady Safe Finance BV	Netherlands	Financing business operation						100%	100%	100%	-	V	
12.	TINC	PT. Timah (Persero) Tbk	Mining	Indometal Corporation (IC) Indometal Limited	USA UK	marketing agents for America regions marketing agents for Europe regions						100%	100%	100%	100%	V	
13.	MYOR	PT. Mayora Indah	Food and Beverages	Mayora Nederland BV	Netherlands	financial services						100%	100%	100%	-	V	
14.	DILD	PT. Iniland Development Tbk	Real Estate and Developer	Dharmala Iniland INV	Curacao	financial services						100%	100%	100%	-	V	
15.	PTBA	PT. New Century Development Tbk	Property and Real Estate	PSI International Finance BV	Netherlands	Property and Real Estate						100%	100%	100%	-	V	
16.	HITS	PT. Humpus Intermoda Transportasi Tbk	Transportation	Genuine Maritime Ltd SA (GML) Heritage Maritime Ltd SA Anadain Company Inc (ACI) Humpuss Sea Transport Sea Pte Ltd First Topaz Inc Lucky Vision Management Corp (LVM) New Century Maritime Inc (NICM) Silverstone Development Inc (SDI) Cometco Shipping Inc Humolco Trans Inc (HTI) MCGC II Inc	Panama Panama Liberia Singapore Panama Panama Panama Panama Panama Liberia Liberia Liberia	Vessel charter service Vessel charter service Vessel charter service Vessel charter service Vessel charter service Vessel charter service Vessel charter service Investment Vessel charter service Vessel management service Vessel charter service						100%	100%	100%	100%	100%	V

No.	Stock	Name	Activity	Subsidiaries	Country	Activity	Ownership				Status di LN	
							2007	2008	2009	2009	Listed	Unlisted
17.	ADHI	PT. Adhi Karya	Construction	Adhi Oman LLC Adhi Multi Power Pte Ltd	Oman Singapore	Construction General Trading	Langsung Langsung	- -	70% 100%	70% 100%	- -	- V
18.	AKRA	PT. AKR Corporindo Tbk	Chemical	Khalista (Luzhou) Chemicals Industries Ltd Guangxi(Gulgang) AKR Container Port Co, Ltd AKR Gulgang Port Co.Ltd AKR (Gulgang) Transshipment Port Co. Ltd AKR (Guangxi) Coal Trading Co. Ltd	China China China China China	Manufacturing Logistics Logistics Logistics Logistics	Langsung Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung	100% 93,98% 100% 78% 100%	100% 93,98% 100% 78% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	- - - - -	V V V V V
20	EKCL	PT XL Axiata Tbk	Telecommunication	Excel Phoneoan 818 B.V. GSM One (I) Ltd. GSM Two (I) Ltd. Excelcomindo Finance Company B.V	Belanda Malaysia Malaysia Belanda	Finance Company Finance Company Finance Company Finance Company	Langsung Langsung Langsung Langsung	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	- - - -	V V V V
21	TRIO	PT Trikomsel Oke Tbk	Telecommunications Product	Trikomsel Pte Ltd	Singapore	Sales distribution of cellular phones	langsung	-	100%	100%	-	V
22	TRADA	PT Trada Maritime Tbk	Maritime Transportation	Hanachen Labuan Samudra Ltd (HLS) Java Maritime Lines, S.A	Labuan Panama	shipping shipping	langsung Tidak Langsung	- -	100% 100%	100% 100%	- -	V V
23	TLUM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Telecommunication	Telekomunikasi Indonesia International Pte.Ltd. Aria West International Finance B.V Telekomunikasi Selular Finance Limited Telkomsel Finance B.V	Singapura Belanda Mauritius Belanda	Telekomunikasi Jasa Perdagangan dan keuangan Keuangan Keuangan	Tidak langsung Tidak langsung Tidak langsung Tidak langsung	- 100% 100% 65,00% 65,00%	100% 100% 100% 65,00% 65,00%	100% 100% 100% 65,00% 65,00%	- - - - -	V V V V V
24	LPLU	PT Star Pacific Tbk	Technology Information (Internet Services)	McCam Investment Pty Ltd	Malaysia	Investment	langsung	99,99%	100%	100%	-	V
25	SMDB	PT Samudra Indonesia Tbk	Maritime Transportation Services	Samudra Shipping Line Limited Ocean Shipping Pte Ltd Foremost Maritime Pte Ltd Samudra Shipping Line (India) Pvt. Ltd Samudra Traffic Co.,Ltd Sikargo, L.L.C. Galaxy Shipping Services Sdn,Bhd Samudra Shipping Line (Vietnam) Co., Ltd Silkang Logistics (Singapore), Pte. Ltd Samudra Emirates Shipping, LLC Samudra Indonesia (Singapore) Pte Ltd	Singapura Singapura Singapura India Thailand Dubai Malaysia Vietnam Singapore Dubai Singapore	Container Shipping Agency Activities Regional shipping of gas and cargo Agency Activities Agency Activities Agency Activities Agency Activities Agency Activities Agency Activities International Freight Forwarding Agency Activities Investment Holding	langsung langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung	65,14% 100% 65,14% 65,14% 65,14% 31,92% 31,92% 31,92% 39,08% 39,08% 51% 65,14% 21,5% 65,14%	65,14% 100% 65,14% 65,14% 65,14% 31,92% 31,92% 31,92% 39,08% 39,08% 33,22% 65,14% 21,5% 65,14%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- V - - - - - - - - - - - -	V V V V V V V V V V V V V
26	SGRO	Sampurna Agro	Palm Seed Production and Palm Plantation, Output Pro	Pajma Agro Limited	Rep.,Seychelles	Holding Company and Management Services	langsung	100%	100%	100%	-	V
27	PNS	Pudjilali and Sons	Property	PNSE Nevada Inc USA	USA	General Activities	Langsung	-	100%	100%	-	V
28	PO	Asia Pacific Timber	Chime Industry and Synthetic Fiber	Polysindo International Finance Company Polysindo (Mauritius) Ltd.	Netherlands Rep. Mauritius	Jasa Keuangan Jasa Keuangan	Langsung Langsung	- -	- -	100% 100%	- -	V V
29	PJIN	Plaza Indonesia Realty	Hotel and Property Development	Plaza Indonesia Finance	Netherlands	Finance Services	Langsung	100%	100%	100%	-	V
30	PTRO	Petrosea	Mining, Construction and Engineering	PTP Investment	Singapore	Investment	Langsung	100%	100%	100%	-	V
31	PGC	Perusahaan Gas Negara	Planning and Development	PGN Euro Finance 2003	Rep. Mauritius	Financing Company	Langsung	100%	100%	100%	-	V
32	TW	Pelayaran Tempuran Emas	Maritime Transportation Services	Anamli Maritime Co. Ltd. (Anamli)	Malta	Lease of Containers	Langsung	99%	99,99%	99,99%	-	V
33	PW	Pakuwon Jati	Property Development	Pakuwon Jati Finance B.V.	Netherlands	Finance Services	Langsung	100%	100%	100%	-	V
34	MLPL	Multipolar	Information Technology Service	Link Technology Services Pte.Ltd. (LTS) Matahari International Finance Company B.V. (MIFCO) Matahari Finance B.V. (MF) Matahari International B.V. (MIBV) Prime Connection Limited (PCL) Brighter Limited (BL) Matahari Department Store (Shenzhen) Limited (MDS) Tristar Capital Limited (Tristar) Bright Regent Corporation (BRC) Merrill Investment Limited (MI) Matahari Trading (Shenzhen) Limited (MTL) Grandbright Corporation Limited (GCL)	Singapore Netherlands Netherlands Netherlands British Virgin Islands British Virgin Islands China Malaysia Hongkong Malaysia China Hongkong	Perdagangan Jasa Finance Finance Finance Investment Investment Penjualan Eceran Investment Investment Investment Perdagangan Umum Perdagangan Investment	Langsung Langsung Langsung Langsung Langsung Langsung Langsung Langsung Langsung Langsung Langsung Langsung Langsung	- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- - - - - - - - - - - - -	V V V V V V V V V V V V V	
35	MRAT	Mustika Ratu	Traditional Herb and Cosmetics	Mustika Ratu (M) Sdn.Bhd. Mustika Ratu Properties (M) Sdn.Bhd.	Malaysia Malaysia	Distribusi dan Perdagangan Penyewaan Properti	Langsung Langsung	100% 100%	100% 100%	100% 100%	- -	V V
36	MLIA	Mulia Industriindo	Glass and Ceramics	Muliakceramik Finance Limited Mulia Glass Finance Limited Mulia Industriindo Finance B.V.	Rep. Mauritius Rep. Mauritius Netherlands	Pembayaan Pembayaan Pembayaan	Langsung Langsung Langsung	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	- - -	V V V

No.	Stock	Name	Activity	Subsidiaries	Country	Activity	Ownership				Status di LN					
							2007	2008	2009	2010	Listed	Unlisted				
48	HMC	M Sampoerna	Cigarettes Industry	Wity East Holding Limited (WEHL) Indofood International Finance Limited (IFIL) Perfect Wealth Investment Limited (PWI) Indofood (M) Food Industries Sdn.Bhd. (FI) Pascari Pte.Ltd. (PPL) Indofood Singapore Holding Pte.Ltd. (ISHPL) Ocean 21 Pte.Ltd. (Ocean 21) Drayton Pte. Ltd. (Drayton) Bogasari International Pte.Ltd. (B) Asian Synergies Limited (ASL) Silver Investment Limited (SIL) Indofood Oil and Fats Pte.Ltd. (IOFPL) Indofood Agri Resources Pte.Ltd. (Indo Agri) Fame Sea Enterprise Inc. (PSE) Special Sky Investments Ltd. (SSL) Bountiful Pro. Ltd. (BPL) Lonsam Singapore Pte.Ltd. Sumatera Bioscience Pte.Ltd. (SB) Ocean Phoenix Pte.Ltd.	British Virgin Islands Rep. Mauritius British Virgin Islands Malaysia Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Rep. Mauritius Singapore Singapore British Virgin Islands British Virgin Islands Singapore Singapore	Investment Special Purpose Subsidiary Investment Manufacture of Noodles Shipping Investment Investment Investment Flour Blending and Trading Investment Investment Investment Shipping Shipping Trading and Marketing Trading and Marketing and Research Shipping	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-		
49	GTL	Usajah Tunggal	Tire	Sampoerna Joo Lan Sdn.Bhd. Sampoerna International Pte.Ltd.	Malaysia Singapore	Cigarette Manufacturing and Trading Equity Holdings	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-		
50	EMT	Elang Mahkota Teknologi	Advertising, Printing and Media	GT 2005 Bonds B.V. (GT Bonds) Asia Tower Pte.Ltd. (ATPL)	Netherlands Singapore	General Trading and Financial Services Telecommunication	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-		
51	EGC	Eladharna International	Adhesive Tapes	Wiko Industries Sdn.Bhd. (Wiko)	Malaysia	Manufacturing and Marketing of Self Adhesive	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-		
52	DYN	Dynaplast	Plastic Packaging	Bell Dynaplast Co.Ltd. Dynaplast Packaging Vietnam Co.Ltd.	Bangkok Vietnam	Plastik dan Kemasan Plastik dan Kemasan	51%	51%	51%	51%	-	-	-	-		
53	DGI	Deuta Graha Indah	Real Estate and Property	Amasjaya Sdn.Bhd	Brunei Darussalam	Jasa Konstruksi	-	-	70%	-	-	-	-	-		
54	DEW	Dharma Henwa	Energy Construction	Prove Energy Investment Ltd. Coal Vista Resources Ltd. Coal Vista Resources Ltd. Vista Vista Ltd. Enercorp Limited Pendopo Coal Ltd.	British Virgin Islands Rep. Seychelles Rep. Seychelles Rep. Seychelles Jersey, UK Rep. Seychelles	Investment Marketing Marketing Investment Marketing Investment	100%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%		
55	CTB	Citra Tubindo	Threading Plain-end Pipes and Accessories	Cita Tubindo China Investment Pte.Ltd. (CTC) Cita Tubindo (International) Pte.Ltd. (CTI) NSTC Premium Tubulars B.V. NS Connection Technology Inc. NS Connection Technology Pte.Ltd. (NST PL)	Singapore Singapore Netherlands USA Singapore	Technical Support Technical Support Patent Holder Master Licensor Technical Support	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
56	CPN	Central Proteina Prima	Shrimp Feed and Poultry Feed	Isadoro Holding B.V. (Isadoro) Blue Ocean Resources Pte.Ltd. (BOR) Central Proteinaprima International Pte.Ltd. (CPP Intel) Shrimp Improvement Systems LLC (SIS) Pacific Aquaculture and Biotechnology LLC (PAB)	Netherlands Singapore Singapore US Hawaii, US	Investment Holding and Trading Business Investment Holding Supplier of Shrimp Stock Supplier of Shrimp Stock	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
57	CTP	Ciputra Development	Development and Property	Ciputra Development International Finance B.V. Centrin Technology Pte.Ltd. Centrin Communications Ltd.	Netherlands Singapore British Virgin Islands	Telecommunications Telecommunications	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-		
58	CENT	Centrin Online	Technology/Information Services	Centrin Technology Pte.Ltd. Centrin Communications Ltd.	Singapore British Virgin Islands	Telecommunications Telecommunications	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-		
59	BUMI	Bumi Resources	Oil and Gas Industry	Forerunner International Pte.Ltd. (Forerunner) Sangatta Holding Limited (SHL) Enercoal Resources Pte.Ltd. (Enercoal) International Mineral Company LLC (IMC) Bumi Resources Japan Co.Ltd. (BBJ) Chippo Investment Pte.Ltd. (Calippo) Knightley Business Resources Pte.Ltd. Bumi Capital Pte.Ltd. (Bumi Capital) Lemington Investment Pte.Ltd. Bumi Netherlands B.V. Kalimantan Coal Limited (KCL) Gallo Oil (Jersey) Ltd. (Gallo) Westside Corporation Ltd. (Westside) Avocet Mining PLC (Avocet) Enercorp Ltd. (Enercorp) Herald Resources Ltd. (Herald)	Singapore Rep. Seychelles Singapore USA Tokyo, Japan Singapore Singapore Singapore Singapore Netherlands Rep. Mauritius Jersey, UK Australia UK UK Australia	Special Purpose Company Special Purpose Company Special Purpose Company Special Purpose Company Marketing Services Special Purpose Company Special Purpose Company Special Purpose Company Special Purpose Company Special Purpose Company Special Purpose Company Oil Mining Coal Bed Methane Mining Gold Mining Marketing Services Coal Seam Gas Mining	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Stock	Name	Activity	Subsidiaries	Country	Activity	Type	Ownership			Status of LN	
								2007	2008	2009	Listed	Unlisted
		Dewayani Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Hopeway Marine Inc			Panama	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Lestari International Shipping S.A.			Panama	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Gandini Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Quimera Maritime S.A.			Panama	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		South Eastern Overseas Navigation S.A.			Panama	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Zenith Overseas Maritime S.A.			Panama	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Gandani Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Zona Shipping S.A.			Panama	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Dewi Sri Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Dahlia Navigation S.A.			Panama	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Egline Navigation S.A.			Panama	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Wulansari Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Yasasani Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Indradi Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Gold Bridge Logistic Ltd.			Hong Kong	Investment holding company	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Belhal New Resources Logistic Corporation			China	Storage Service	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Gold Bridge Shipping Agencies S.A.			Panama	Shipping Agency	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Elite Bauhinia Navigation Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Compaka Navigation Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Dahlia Navigation Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Frestia Navigation S.A.			Panama	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Gerbera Navigation S.A.			Panama	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Mustokoweni Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Uluji Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Erowati Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Gas Papua Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Rasawulan Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Gas Sulawesi Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Tribuana Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Gagamayang Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Prita Dewi Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Purwati Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Trijata Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Pradapa Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Perpiwati Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Badralini Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Banunawati Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Gas Maluku Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Barawati Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Gas Bali Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Eustoma Navigation S.A.			Panama	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Puspawati Maritime Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Diamond Flow Ltd.			Hong Kong	Investment holding company	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Ukabula International Ltd.			Hong Kong	Investment holding company	langsung	100%	100%	100%	-	v
		BLT Chembulk BV			British Virgin Islands	Investment holding company	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk Tankers LLC			Marshall Island	Investment holding company	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk Trading II LLC			Marshall Island	Investment holding company	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk Management LLC			USA	Ship Management	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk Management B.V.			Balanda	Ship Management	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk Management Pte. Ltd.			Singapore	Ship Management	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk Barcelona Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk Gibraltar Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk Hong Kong Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk Houston Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk Kobe Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk New York Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk Savannah Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk Shanghai Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk Ulsan Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk Virgin Gorda Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Chembulk Yokohama Pte. Ltd.			Singapore	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Banyu Laju Corporation			Malaysia	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
		Banyu Laju Maritime S.A.			Panama	Owner and operator of vessel	langsung	100%	100%	100%	-	v
55	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero)	Banking		Hongkong	Finance services	Langsung	-	99,99%	100%	-	v
56	BMRI	Bank Mandiri (Persero)	Banking		Kuala Lumpur London	Jasa Pengiriman Uang Perbankan	Langsung	-	100%	100%	-	v
57	AUTO	Astra Otoparts	Spare Part Trading and Component Automotive Service		Australia	Automotive Parts Sales Distributor in Australia	Langsung	100%	100%	100%	-	v
68	ELTY	Bakrieland Development	Contractor, Trading and Services Related to Real Estate		British Virgin Islands	Investment Holding Company	Tidak Langsung Melalui PT Bakrie Toll Road	-	-	100%	-	v
					British Virgin Islands	Investment Holding Company	Tidak Langsung Melalui PT Bakrie Toll Road	-	-	100%	-	v

No. Stock	Name	Activity	Subsidiaries	Country	Activity	Ownership				Type	Status di LN		
						2007	2008	2009	2010		Listed	Unlisted	
69 AKPI	PT. Anka Karya Prima Industri, Tbk	produksi & distribusi	International Resource (HK) Ltd Stenta Films (Malaysia) Sdn.Bhd Ariene (Shanghai) Co. Ltd	Hong Kong Malaysia China	Marketing & trading Manufacture of BOPP films Marketing & trading of films	langsung langsung tidak langsung (melalui International Resource-HongKong)	98% 70% 98%	98% 70% 98%	98% 70% -	- - -	- - -	V V V	
70 BNI	PT. Bank International Indonesia, Tbk	Banking	BI Finance Co.Ltd	Hong Kong	Banking	langsung, dilikuidasi Mei 2007, jln. dicabut Des 2007	100%	-	-	-	-	-	V
71 INKP	PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk	industri, perdagangan, pertambangan, kehutanan	Indah Kiat International Finance Company B.V Indah Kiat Finance Mauritius Ltd Indah Kiat Finance (IV) Mauritius Ltd Indah Kiat Finance (III) Mauritius Ltd IK Import & Export Ltd Indah Kiat Finance (VII) Mauritius Ltd Global Fibre Ltd	Belanda Mauritius Mauritius British Virgin Islands Mauritius Malaysia Cayman Islands Belanda	Jasa Keuangan Jasa Keuangan Jasa Keuangan Distribusi Jasa Keuangan Investasi Jasa Keuangan Jasa Keuangan Perdagangan	langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	V V V V V V V V V	
72 INTG	PT. Indocement Tunggal Prakasa, Tbk	Portland Cement Industry, Packaging White Cement, Sil	Indocement Ltd	Cayman Islands	Investment in associated company	langsung	100%	-	-	-	-	-	V
73 ADNG	PT. Polychem Indonesia Tbk	Industri, polyester	GPI Netherlands B.V.	Belanda	General trading and financial Services	langsung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	V
74 ANTI	PT. Aneka Tambang Tbk	Mining	Anam Europe B.V Anam Finance Limited BHP Asia Pacific Nickel Pty.Ltd. (BHPAPN)	Belanda Belanda Austria	Investment company Investment company Investment company	langsung langsung langsung	100% 100% -	- - 100%	- - 100%	- - -	- - -	- - -	V V V
75 APEX	PT. APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk	Onshore & Offshore Drilling	Apekindo Asia Pacific B.V Apekindo Khatulistiwa B.V Apekindo Offshore Pte.Ltd Apekindo Ranhoro Pte.Ltd	Amsterdam Amsterdam Singapore Singapore	Raise funds Raise funds Raise funds Acquire & hold and charter ships & vessels	langsung langsung langsung langsung	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	- - - -	- - - -	- - - -	V V V V	
76 APO	PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk	Domestic & International Transportation	Arpeni Pratama Ocean Line Investment B.V Mega Pacific Ocean Line Corporation Arpeni Marine Co.Pte.Ltd Grand Bulk Shipping Limited Arpeni Shipping Co.Pte.Ltd YED 1 S.A YED 2 S.A YED 3 S.A YED 4 S.A YED 5 S.A Rosaceae Maritime Overseas S.A Gaselee Navigation Inc. Iridaceae Maritime S.A Raflesia Marine S.A Illicium Maritime S.A Ever Joy Maritime Incorporation S.A Ever Joy Navigation S.A Lobelia Maritime Overseas S.A Prosperous Ships Holding Limited Handy Marine Inc.	Belanda Labuan, Malaysia Singapore Singapore Singapore Panama Panama Panama Panama Panama Panama Panama Panama Panama Panama Panama Panama Panama St. Vincent & Grenadines	Finance Investment company Ship repair & shipbuilding Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel Transporting cargo by vessel	langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75,00% 75,00%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	
77 AQJ	PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk	Manufacturing & bottling of drinking water	IBC Sendorian Berhad	Brunei Darussalam	Manufacturing & bottling of drinking water	langsung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	V
78 BPP	PT. BUJWANTALA IND/SH PERMAI Tbk	Development & Management of Property	BJP Holdings International Pte Ltd	Singapore	Investment	langsung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	V
79 BMTI	PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk	Investment	Media Nusantara Citra B.V MNC International Middle East Limited MNC International Limited MNC Pictures FZ LLC Mobile & Telecom Finance Company B.V. Global Mediacom International Ltd.	Belanda Dubai Cayman Islands Dubai Dubai Belanda Dubai	Content & adv artising based media Content & adv artising based media Content & adv artising based media Content & adv artising based media Subscribers based media Infrastructure	tidak langsung (melalui PT. Media Nusantara Citra Tbk) tidak langsung (melalui PT. Media Nusantara Citra Tbk) tidak langsung (melalui MNC International Middle East Limited) tidak langsung (melalui MNC International Middle East Limited) tidak langsung (melalui PT. Mobile-8 Telecom Tbk)	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	V V V V V V V	
80 BNBR	PT. BAKRIE & BROTHERS Tbk	General Trading & Industry	Bestday Assets Limited Bakrie (BSP) Limited Blue Cape B.V. Infrastructure Capital International Limited Richweb Holdings Limited BSP Finance B.V Farina Investment Inc Bakrie International Finance BV Bakrie Fund Pte.Ltd. Bakrie Investment Pte.Ltd. Sibastopol Inc.	Mauritius Mauritius Belanda British Virgin Islands Mauritius Belanda Malaysia Netherlands Singapore Singapore Cayman Islands	Investment Investment Financial Service Financial Service Investment Financial Service Investment Consulting and project management Financial Service Investment Investment Investment Investment	langsung langsung langsung tidak langsung (melalui PT. Bakrie Communications (Jakarta)) tidak langsung (melalui Bakrie BSP Limited) langsung langsung langsung langsung langsung	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	V V V V V V V V V V V V V		

No.	Stock	Name	Activity	Subsidiaries	Country	Activity	Type	Ownership			Status of LN	
								2007	2008	2009	Listed	Unlisted
81	BRPT	PT. BARITO	forestry related, business, agriculture, mining, industry	Baikrie Energy International Pte.Ltd. Helix Investment Holding Ltd. Baikrie Petroleum International Pte.Ltd. Jupiter Asia No.1 Pte.Ltd. Fordways Management Ltd. Bookwise Investment Ltd.	Singapore British Virgin Islands Singapore Singapore British Virgin Islands	Trading Investment Investment Investment	langsung Tidak Langsung Tidak Langsung (melalui Halik) Tidak Langsung	100%	100%	100%	-	-
82	CMNP	PT CITRA MARGA NUSA/PHALA PERSADA Tbk	Proyek Jalan Tol	Citra Marga Finance B.V	Belanda	Membayai kegiatan perusahaan	langsung (dikukusasi Aug 2007)	100%	-	-	-	-
83	DART	PT. DUTA ANGGADA REALTY Tbk	Real Estate Development	Duta Anggada International B.V	Belanda	Financing,holdings	langsung (tidak aktif sejak 2006)	100%	100%	-	-	-
84	DAVO	PT. DANOMAS ABADI Tbk	Industri Pengolahan Biji Coklat	Dayomas International Finance Company Pte Ltd	Singapore	Financing	langsung	100%	-	-	-	-
85	ELSA	PT. ELSA Tbk	Jasa, Pertambangan, Perdagangan, Pembangunan dan	Elnusa Bangkalan Energy Ltd	British Virgin Islands	Eksplorasi dan Produksi Migas	langsung	100%	-	-	-	-
86	ENRI	PT. ENERGI MEGA PERSADA Tbk	Jasa, Pertambangan, Perdagangan	RHI Corporation Kondur Petroleum S.A Energi Mega Pratama Inc EMIP Eksplorasi (Kangean) Ltd Kangean Energy Indonesia Ltd Kailla Energy Ltd Lapindo Bramas, Inc Pan Asia Enterprise Ltd Malacca Brantas Finance B.V Energi Mega Pratama Finance B.V Costa International Group Limited Kailla (Bentul) Ltd Energi Mega Pratama Pte.Ltd Tunas Harapan Perkasa Pte. Ltd Enviroco Company Ltd	USA Panama British Virgin Islands Inggris USA USA Hong Kong Hong Kong Belanda Belanda British Virgin Islands British Virgin Islands Singapore Singapore Seychelles	Eksplorasi dan Produksi Migas Eksplorasi dan Produksi Migas Eksplorasi dan Produksi Migas Eksplorasi dan Produksi Migas Eksplorasi dan Produksi Migas Eksplorasi dan Produksi Migas Eksplorasi dan Produksi Migas Eksplorasi dan Produksi Migas Financing Eksplorasi dan Produksi Migas Eksplorasi dan Produksi Migas Eksplorasi dan Produksi Migas Eksplorasi dan Produksi Migas Eksplorasi dan Produksi Migas	langsung tidak langsung langsung tidak langsung tidak langsung langsung tidak langsung tidak langsung langsung langsung tidak langsung tidak langsung tidak langsung langsung langsung	100% 100% 100% 50% 50% 50% 99,99% 100% 99,99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		
87	ERTY	PT. ERATEX DJAJA Tbk	Industri Tekstil	ASA Partners Holdings Ltd PT. Eratex (Hong Kong) Ltd	British Virgin Islands Hong Kong	Sub Industri Perusahaan Perdagangan(Umum)	langsung	93,55% 100%	-	-	-	-
88	FASB	PT. FAJAR SURYA WISESA Tbk	Paper Manufacturing	Fajar Paper Finance B.V	Belanda	Pendanaan dan Investasi	langsung	100%	100%	-	-	-
89	FPNI	PT. FATRAPOLINDO NUSA INDUSTRI Tbk		Fatra International Holding Ltd	Malaysia	Investasi	langsung	100%	-	-	-	-
90	FREO	PT. MOBILE-8 TELECOM Tbk	Telekomunikasi	Mobile-8 Telecom Finance Company B.V.	Belanda	Telecommunication	langsung	100%	100%	100%	-	-
91	IATG	PT. INFOASIA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk	Trading, services,telecommunications network and	Global Communication Inc Distribution Technology Inc	Malaysia Malaysia	Telecommunications data andVoice traffic Computer trading	langsung langsung	100% 100%	-	-	-	-
92	KKGI	PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk	Manufacturing formaldehyde and thermosetting adhes	Barkey International Limited	British Virgin Islands	Coal Mining	langsung (tidak aktif)	100%	100%	-	-	-
93	KLBE	PT. KALBE FARMA Tbk	Manufacture and distribution of Pharmaceutical Product	Indogene kalbiotech Pte Ltd Kalbe Vision Pte Ltd	Singapore Singapore	Pharmaceutical Development, Production, Marketing, Distribusi Wholesale of Medicinal and Pharmaceutical	langsung langsung	90,79% 100% 100%	91,89% 100% 100%	93,01% 100% 100%	- - - - - -	- - - - - -
94	LSIP	PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA/INDONESIA Tbk	Industri Perkebunan	Lonsum Singapore Pte. Ltd Sumatra Bioscience Pte.Ltd.	Singapore Singapore	Trading & marketing Trading & marketing, Research	langsung Tidak Langsung	100% 100%	100% 100%	-	-	-
95	LTLA	PT. LAUTAN LUAS Tbk	Trading, Manufacturing, Agriculture, Mining, Transport	Lautan Luas Singapore Pte Ltd Lautan Hongze Chemical Industry Ltd Lautan Luas Trading (Shanghai) Co Ltd Lautan Luas (Thailand) Co Ltd Lautan Luas Vietnam Co Ltd	Singapore China China Thailand Vietnam	Distribution Chemical Production Distribution Chemical Production Distribution	langsung tidak langsung tidak langsung (melalui Lautan Luas Singapore Pte Ltd) tidak langsung (melalui Lautan Luas Singapore Pte Ltd) tidak langsung (melalui Lautan Luas Singapore Pte Ltd)	100% 100% 60% 100% 99,95% 100%	100% 100%	-	-	-
96	MYTX	PT. APAC CITRA CENTERFLEX Tbk	Tekstil & garmen	Jayatec Inc.	New York	Marketing Agency	tidak langsung	42,69%	-	-	-	-
97	PGAS	PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk	Developing uses of natural gas for the benefit of the pu	PGN Euro Finance 2003 Limited	Mauritius	Financing company	langsung	100%	100%	100%	-	-
98	SCBD	PT. DANAYASA ARTHA/TAMA Tbk	Real estate & property, office building, shopping center	Defina Group Holdings Limited	Malaysia	Investment in associated company	langsung	64%	64%	-	-	-
99	SKBM	PT. SEKAR BUMI/TBK	Pengolahan Perikanan Laut dan Darat, Hasil Bumi dan PPT, Sekar Alam		Japan	Industri Pengolahan Mete, minyak Mete dan pe	tidak langsung	34,00%	95,99%	-	-	-
100	SMCB	PT. HOLDING INDONESIA Tbk	Operation of cement plants and cement industry	Cibinong International Finance Company B.V Cibinong International Finance Limited	Belanda Mauritius	Finance Company Finance Company	langsung langsung	100% 100%	-	-	-	-
101	SSIA	PT. SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk	Manufacturing, trading, construction, agriculture, minin		Cayman Islands	Investing in shares of stock of other companies	langsung	100%	100%	-	-	-

No. Stock	Name	Activity	Subsidiaries	Country	Activity	Ownership				Status of LN				
						Type	2007	2008	2009	Listed	Unlisted			
102 TKIM	PT. PABRIK KERTAS TIJWI/ KIMIA Tbk	Industri Pulp, kertas dan hasil produksi kertas	Tijwi Kimia International Finance Company B.V Tijwi Kimia Trading (ll) Limited Tijwi Kimia Finance Mauritius Limited TK Trading Limited Tijwi Kimia Trading (ll) Limited TK Import & Export Ltd Tijwi Kimia Finance B.V. Marchhall Enterprise Ltd	Belanda British Virgin Islands Mauritius Cayman Islands British Virgin Islands Belanda Malaysia	Bidang Keuangan Distributor Bidang Keuangan Distributor Distributor Bidang Keuangan Bidang Keuangan	langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -		
103 TRST	PT. TRIAS SENTOSA Tbk	Industri dan perdagangan polypropylene dan polyester	Astria Packaging Pte Ltd Triandin Sunshine Plastics Limited Company	Singapore China	Investasi, perdagangan umum, importir, eksportir Pabrik dan penjualan BOPP films	langsung tidak langsung (melalui Astria Packaging Pte Ltd)	100% 100%	100% 100%	100% 100%	- -	- -	- -	- -	
104 TRUB	PT. TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERIN Tbk	Jasa penunjang kegiatan Pembangkit tenaga listrik, kon	TAME Turnkey Construction Pte Ltd Manunggal (Beijing) Intl Trading Co.Ltd. Truba Luring Engineering Pte Ltd	Singapore Singapore Singapore	Jasa rekayasa bangunan pabrik Trading Kontraktor Umum, jasa konsultasi konstruksi, dll	langsung langsung tidak langsung (melalui PT. Truba Jaya Engineering)	100% 100% 100%	100% 100% 100%	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
105 TSP-	PT. TEMPO SCAN PACIFIC Tbk	Farmasi	Tempo Pacific Holding Ltd Tempo Nagadi Asia Pte Ltd International Beauty Products Ltd RT Beauty Care Ltd Tempo Scan Pacific Philippines Inc	Malaysia Singapore Thailand Thailand Philippines	Investments Trading business and purchasing services Cosmetic trading Cosmetic manufacturing Distribution and marketing services	langsung tidak langsung (melalui PT. Tempo Nagadi Trading) tidak langsung (melalui Tempo Pacific Holding Ltd) tidak langsung (melalui Tempo Pacific Holding Ltd & International) tidak langsung (melalui Tempo Pacific Holding Ltd)	100% 100% 100% 100% 100%	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
106 UNIS-	PT. UNGGUL INDAH CAHYA Tbk	Manufacture of alkylbenzene chemicals, land transport	Universal Interchemicals Corp. Pte. Ltd UIC Vietnam Co Ltd Auriga & Wilson (Australia) Ltd Albright & Wilson New Zealand Ltd United Austind Chemicals Pte Ltd	Singapore Vietnam Australia New Zealand Singapore	Trading and Investment Manufacturing and distribution of active deterg Manufacturing and distribution of phosphate or Distribution of phosphate and surfactant Investment	langsung langsung tidak langsung (melalui Universal Interchemicals Corp. Pte. Ltd) tidak langsung (melalui Albright & Wilson (Australia) Ltd) tidak langsung (melalui PT. Unggul Indah Investama)	100% 100% 100% 100% 90-93%	100% 100% 100% 100% 90-93%	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
107 UNS-	PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATION Tbk	Agriculture, processing and trading of agricultural and	BSP Finance B.V Fordways Management Ltd. Bookwise Investment Ltd.	Belanda British Virgin Islands	Finance Financial Services, Established for Administration Financial Services, Established for Administration	langsung Tidak Langsung Tidak Langsung	100% - -	100% - -	- 100% 200%	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Lampiran 5

Daftar pertanyaan kuesioner:

1. Apakah anda tahu / pernah mendengar tentang konsep *Controlled Foreign Corporation* (CFC/perusahaan luar negeri terkendali)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-RaguJawaban:

2. Apakah anda mengetahui bahwa Psl 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek merupakan *specific anti tax avoidance rules* terkait dengan *Controlled Foreign Corporation*?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-raguJawaban:
Alasan:.....
.....

3. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak melalui penangguhan/penundaan pembagian dividen dari anak perusahaan di luar negeri, **apakah menurut anda** konsep “*deferral*” dalam dividen, dimana dividen belum dikenakan pajak selama dividen itu belum dibagikan, merupakan suatu bentuk penghindaran pajak?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-RaguJawaban :
Alasan:.....
.....

4. Apakah anda **mengetahui** peraturan pelaksanaan dari Pasal 18 ayat (2) yaitu KMK No 650/KMK.04/1994 tentang Penetapan saat diperolehnya dividen atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak

diperdagangkan di bursa efek , yang diganti dengan PMK No 256/PMK.03/2008 tentang penetapan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek yang berlaku per 1 Jan 2009?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

Jawaban:

5. KMK 650/KMK.04/1994 yang diganti dengan PMK 256/PMK.03/2008 menetapkan bahwa untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat perolehan dividen atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek **ditetapkan** 4 bulan setelah batas waktu kewajiban penyampaian SPT tahunan di luar negeri atau 7 bulan setelah tahun pajak berakhir apabila tidak ada ketentuan penyampaian SPT. Apakah anda setuju dengan “*deemed dividend*” yang diwajibkan dalam peraturan ini?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

Jawaban:

Alasan:

.....
.....

6. KMK No 650/KMK.04/1994 menetapkan CFC dikenakan hanya untuk penyertaan modal di atas 50% di 32 negara yang dianggap *tax haven*, akan tetapi pada PMK No.256/PMK.03/2008, CFC dikenakan untuk penyertaan modal di atas 50% di semua negara, apakah menurut anda penerapan aturan ini terhadap investasi di semua negara akan lebih efektif untuk mencegah penghindaran pajak?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu,

Jawaban :

Alasan:.....
.....

7. Apakah menurut anda, penetapan *deemed dividend* memberi kepastian hukum bagi Wajib pajak?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

Jawaban :

Alasan:.....
.....

8. Menurut pengalaman anda, khususnya pada saat pemeriksaan, pernahkan anda menemukan wajib pajak yang melaporkan *deemed dividend* di dalam SPT Tahunan PPh, atas penghasilan dividen yang diperoleh dari anak perusahaan yang merupakan badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

Jawaban:.....

9. Jika anda pernah menemukan *deemed dividend*, adakah metode penghitungan khusus untuk untuk perhitungan *deemed dividend*?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

Jawaban :

Jenis metode :
.....

10. Bukti bukti apa sajakah yang biasanya/dapat diberikan oleh Wajib Pajak didalam proses pemeriksaan pajak sehubungan dengan "*deemed dividend*"? Misalnya:

- a. Laporan Keuangan Anak Perusahaan Di Luar Negeri
- b. Perjanjian/Agreement
- c. Tidak memberikan bukti
- d. Lain-Lain, yaitu :

.....
Jawaban :

11. Pada pasal 3 PMK 256/PMK.03/2008 disebutkan “*deemed dividend*” wajib dilaporkan WPDN dalam SPT Tahunan PPh WP untuk tahun pajak pada saat dividen **dianggap dibagikan**, dan pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan kemudian pada saat dividen tersebut benar-benar telah dibagikan dan dipotong pajak maka pengkreditan pajaknya dilakukan pada tahun dibayar atau dipotongnya pajak? Menurut anda, apakah hal ini menimbulkan kesulitan dari sisi administrasi bagi WP?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

Jawaban: ...

Alasan:.....
.....

12. Apakah menurut anda, keputusan untuk menunda pembagian dividen oleh anak perusahaan di luar negeri merupakan suatu bentuk penghindaran pajak?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

Jawaban:

Alasan:.....
.....

13. Bagaimanakah pendapat anda secara keseluruhan mengenai kebijakan *Controlled Foreign Corporation* di Indonesia?

.....
.....
.....

Lampiran 6

No	Pertanyaan	Jawaban	Pemeriksa				Account Representative							
			KPP WP Besar Satu		KPP PMB		TOTAL		KPP WP Besar Satu		KPP PMB		TOTAL	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tahu/pernah mendengar CFC	a. Ya	10	90%	8	90%	18	90%	3	30%	3	30%	6	30%
		b. Tidak	0	0%	0	0%	0	0%	3	30%	2	25%	5	25%
		c. Ragu-ragu	0	0%	2	20%	2	10%	4	40%	5	45%	9	45%
		Total	10	100%	10	100%	20	100%	10	100%	10	100%	20	100%
2	Tahu bahwa Psl 18(2) merupakan specific anti tax avoidance untuk CFC	a. Ya	10	100%	10	100%	20	100%	3	30%	3	30%	6	30%
		b. Tidak	0	0%	0	0%	0	0%	4	40%	2	20%	6	30%
		c. Ragu-ragu	0	0%	0	0%	0	0%	3	30%	5	50%	8	40%
		Total	10	100%	10	100%	20	100%	10	100%	10	100%	20	100%
3	Apakah <i>deferral</i> dalam dividen merupakan penghindaran pajak	a. Ya	9	90%	9	90%	18	90%	3	30%	5	50%	8	40%
		b. Tidak	1	10%	1	10%	2	10%	2	20%	0	0%	2	10%
		c. Ragu-ragu	0	0%	0	0%	0	0%	5	50%	5	50%	10	50%
		Total	10	100%	10	100%	20	100%	10	100%	10	100%	20	100%
4	Tahu peraturan CFC yaitu KMK 650/KMK.04/1994 dan perubahannya PMK 256/PMK.03/2008	a. Ya	10	90%	8	80%	18	80%	4	40%	5	50%	9	45%
		b. Tidak	0	0%	1	10%	1	5%	2	20%	0	0%	2	10%
		c. Ragu-ragu	0	0%	1	10%	1	5%	4	40%	5	50%	9	45%
		Total	10	100%	10	100%	20	100%	10	100%	10	100%	20	100%
5	Setujukah dengan " <i>deemed dividend</i> " yang diatur di dalam PMK 256/PMK.03/2008	a. Ya	10	95%	9	90%	19	95%	5	50%	5	50%	10	50%
		b. Tidak	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
		c. Ragu-ragu	0	0%	1	10%	1	5%	5	50%	5	50%	10	50%
		Total	10	100%	10	100%	20	100%	10	100%	10	100%	20	100%
6	Apakah lebih efektif dengan perubahan dari pembatasan CFC pada 32 negara menjadi semua negara	a. Ya	10	95%	9	90%	19	95%	5	50%	4	40%	9	45%
		b. Tidak	0	0%	0	0%	0	0%	1	10%	0	0%	1	5%
		c. Ragu-ragu	0	0%	1	10%	1	5%	4	40%	6	60%	10	50%
		Total	10	100%	10	100%	20	100%	10	100%	10	100%	20	100%
7	Apakah " <i>deemed dividend</i> " memberi kepastian hukum bagi WP	a. Ya	7	70%	9	90%	16	80%	4	40%	5	50%	9	45%
		b. Tidak	0	0%	0	0%	0	0%	1	10%	0	0%	1	5%
		c. Ragu-ragu	3	30%	1	10%	4	20%	5	50%	5	50%	10	50%
		Total	10	100%	10	100%	20	100%	10	100%	10	100%	20	100%
8	Pernah menemukan CFC berdasarkan pengalaman sebagai Pemeriksa atau AR	a. Ya	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
		b. Tidak	9	90%	10	100%	19	95%	5	50%	4	40%	9	45%
		c. Ragu-ragu	1	10%	0	0%	1	5%	5	50%	6	60%	11	55%
		Total	10	100%	10	100%	20	100%	10	100%	10	100%	20	100%
9	Jika pernah, adakah metode khusus dalam menghitung " <i>deemed dividend</i> "	a. Ya	0	0%	1	10%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%
		b. Tidak	7	70%	2	20%	9	45%	4	40%	3	30%	7	35%
		c. Ragu-ragu	3	30%	7	70%	10	50%	6	60%	7	70%	13	65%
		Total	10	100%	10	100%	20	100%	10	100%	10	100%	20	100%
10	Bukti yang diberikan WP	a. Lap.Keu anak perusahaan di LN	1	20%	3	30%	4	20%	2	20%	2	20%	4	20%
		b. Perjanjian	3	30%	3	30%	6	30%	1	10%	0	0%	1	5%
		c. Tidak ada bukti	0	0%	1	10%	1	5%	3	30%	2	20%	5	25%
		d. Lain-lain	6	60%	3	30%	9	45%	3	30%	6	60%	9	45%
		Total	10	100%	10	100%	20	100%	7	70%	8	80%	15	75%
11	Kesulitan adminitrasi dalam pengkreditan pajak	a. Ya	7	70%	0	0%	7	35%	0	0%	0	0%	0	0%
		b. Tidak	2	20%	8	80%	10	50%	3	30%	5	50%	8	40%
		c. Ragu-ragu	1	10%	2	20%	3	15%	7	35%	5	50%	12	60%
		Total	10	100%	10	100%	20	100%	10	100%	10	100%	20	100%
12	Keputusan menunda pembagian dividen merupakan penghindaran pajak	a. Ya	4	40%	8	80%	12	60%	4	40%	3	30%	7	35%
		b. Tidak	0	0%	0	0%	0	0%	2	20%	1	10%	3	15%
		c. Ragu-ragu	6	60%	2	20%	8	40%	4	40%	6	60%	10	50%
		Total	10	100%	10	100%	20	100%	10	100%	10	100%	20	100%

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 650/KMK.04/1994 TANGGAL 29 DESEMBER 1994
TENTANG

PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek;
- b. bahwa penangguhan pembagian laba atas penyertaan pada badan usaha di luar negeri untuk waktu yang tidak terbatas dapat dipakai untuk menghindari pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk mencegah penghindaran pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan, dipandang perlu untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 TAHUN 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459) dan dengan Undang-Undang nomor 10 TAHUN 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3567);
3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

Pasal 1

- (1) Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, ditetapkan pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (2) Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir.

Pasal 2

Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Wajib Pajak yang:

- a. memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri.

Pasal 3

Badan usaha di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 adalah badan usaha yang bertempat kedudukan di negara atau tempat seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menghitung dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak saat dividen tersebut dianggap diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (3) Apabila kemudian terjadi pembagian dividen dalam jumlah yang melebihi dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan jumlah tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikan nya dividen tersebut.

Pasal 5

- (1) Penghitungan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dilakukan apabila sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, badan usaha di luar negeri dimaksud sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak.
- (2) Apabila kemudian terjadi pembagian dividen selain dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dividen tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikan nya dividen tersebut.

Pasal 6

- (1) Pajak atas dividen yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikreditkan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 TAHUN 1994.

- (2) Dalam hal terjadi pembagian dividen yang saat perolehannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pajak yang dibayar atau dipotong di luar negeri atas dividen tersebut dikreditkan pada tahun pajak dibayar atau dipotongnya pajak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 TAHUN 1994.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

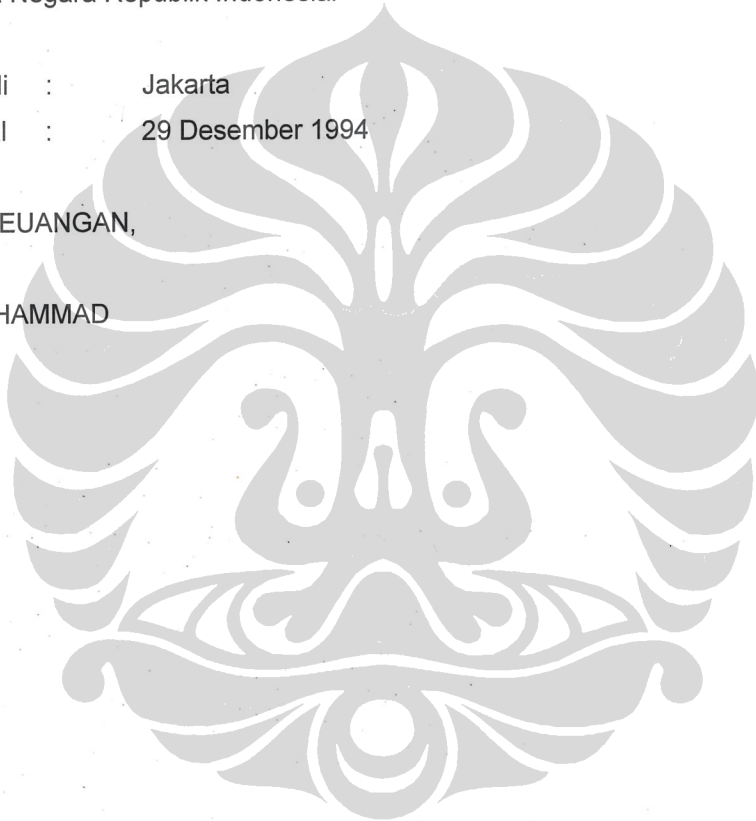
Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Desember 1994

MENTERI KEUANGAN,
ttd
MAR'IE MUHAMMAD





MENTERI KEUANGAN

Lampiran

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 650 /KMK.04/1994

Tanggal : 29 Desember 1994

DAFTAR NEGARA ATAU TEMPAT KEDUDUKAN
BADAN USAHA DI LUAR NEGERI

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. ARGENTINA | 18. MAURITIUS |
| 2. BAHAMA | 19. MEXICO |
| 3. BAHRAIN | 20. NEDERLAND ANTILES |
| 4. BALIZE | 21. NIKARAGUA |
| 5. BERMUDA | 22. PANAMA |
| 6. BRITISH ISLE | 23. PARAGUAY |
| 7. BRITISH VIRGIN ISLAND | 24. PERU |
| 8. CAYMAN ISLAND | 25. QATAR |
| 9. CHANNEL ISLAND GREENSEY | 26. ST. LUCIA |
| 10. CHANNEL ISLAND JERSEY | 27. SAUDI ARABIA |
| 11. COOK ISLAND | 28. URUGUAY |
| 12. EL SALVADOR | 28. VENEZUELA |
| 13. ESTONIA | 30. VANUATU |
| 14. HONGKONG | 31. YUNANI |
| 15. LIECHTENSTEIN | 32. ZAMBIA |
| 16. LITHUANIA | |
| 17. MACAU | |

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN,



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

MAR'IE MUHAMMAD

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 256/PMK.03/2008 TANGGAL 31 DESEMBER 2008
TENTANG

PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG
MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 28 TAHUN 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG nomor 36 TAHUN 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK.

Pasal 1

Saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek adalah:

- a. pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan; atau
- b. pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir apabila badan usaha di luar negeri tersebut tidak

memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 2

Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Wajib Pajak dalam negeri yang:

- a. memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri.

Pasal 3

- (1) Besarnya dividen yang wajib dihitung oleh Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar jumlah dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, badan usaha di luar negeri dimaksud sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak saat dividen tersebut dianggap diperoleh.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerima pembagian dividen dalam jumlah yang melebihi jumlah dividen yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), atas kelebihan jumlah dividen tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri menerima pembagian dividen selain dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dividen tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut.

Pasal 5

- (1) Pajak atas dividen yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikreditkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- (2) Pengkreditan pajak yang dibayar atau dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun pajak dibayarnya atau dipotongnya pajak tersebut.

Pasal 6

Ketentuan mengenai:

- a. tata cara pelaporan penerimaan dividen dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- b. tata cara penghitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan

- c. tata cara pengkreditan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI